

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Sumber Lainnya

- Arthawani, G. (2021). Digital Repository Universitas Jember. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).
- Fitri, D., Pascasarjana, P., & Utara, U. S. (2007). *Ditinjau Dari Hukum Perjanjian (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara di padang)*.
- Nurbatin, D., & Lestari, P. (2019). Pengembangan Sistem Mutu untuk Informasi Akuntansi Rumah Sakit. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 3(3), 229–249. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i3.229>
- Polii, F. P. K., Pangemanan, S. S., Lambey, R., Negara, K., Lelang, D. A. N., Manado, K., Negara, K., Lelang, D. A. N., Manado, K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2021). *Analisis Of Billing State Receivable System At KPKNL, Analisis , Piutang Negara , Sistem Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 841-850*.
- Rahmayanti, E. A. (2021). *Pelaksanaan Administrasi Pengurusan Piutang Negara Pada KPKNL*. Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. In *Digital Repository Universitas Jember*.
- Sinurat, D. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Keuangan RI. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Keuangan RI. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Kementerian Keuangan RI. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 1960. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017. *Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. 24 November 2017. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 35. (2017). *Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*. *Peraturan Pemerintah*, 5, 1–16.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.